PERKEMBANGAN TERAKHIR SJSN DAN PERAN LAYANAN PRIMER

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD
Wamenkes RI
Disampaikan pada Kuliah Perdana S2 IKM dan Farmasi UGM
Jogjakarta, 6 September 2013

1

SISTEMATIKA PENYAJIAN

1. Pendahuluan
2. Update progress persiapan JKN
3. Progress model penyiapan JKN
4. Rencana integrasi Jamkesda ke JKN
5. Progress Uji Coba JKN
6. Penutup

2

Pendahuluan

3

PERSIAPAN IMPLEMENTASI JKN

Tahun 2011:
Penerbitan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS

Awal tahun 2012:
Pembentukan Pokja Persiapan SJSN baik lintas Kementerian dan lintas unit internal Kemenkes

Tahun 2012:
Penyusunan PP PBI dan Perpres Jamkes (kepesertaan, manfaat, iuran, dll)

Tahun 2013:
Persiapan intensif melalui masing-masing Pokja (6 Pokja) dg agenda prioritas dan pembentukan SetGab Kemenkes, DJSN, Askes

Tahun 2014:
Implementasi JKN

4

PROGRESS AGENDA PRIORITAS 1

NO	TRACK	PROGRESS
1	REGULASI	
2	PEMBIAYAAN DAN TARIF PELAYANAN	
3	PENGALIHAN PROGRAM & KELEMBAGAAN	
4	PENYIAPAN PROVIDERS	
5	PENGUATAN YANKES PRIMER & RUJUKAN	
6	IT/SIM BPJS KESEHATAN	
7	SOSIALISASI	
8	SDM KESEHATAN	
9	FARMASI DAN ALKES	
10	RENCANA AKSI	
11	MODEL PENYIAPAN JKN	

5

Update progress persiapan JKN

6

TRACK 1 : REGULASI *(1/2)*

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PERPRES NO 12/2013 TTG JAMINAN KESEHATAN	KEMENKES	
2	PP NO 101/2012 TTG PBI JAMINAN KESEHATAN	KEMENSOS	
3	PP PENCABUTAN PP NO 69 THN 1991, PP NO 28 THN 2003, DAN REVISI PP No 14 TAHUN 1993	KEMENKES	
4	PERMENKES TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	KEMENKES	
5	PERMENKES TENTANG STANDAR TARIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	KEMENKES	
6	PP TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BPJS	KEMENKES	
7	PERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.	KEMENKES	

7

TRACK 1 : REGULASI *(2/2)*

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
8	RPP TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS BPJS DAN DJS KESEHATAN	KEMENKES	
9	PERPRES TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI BPJS	KEMENKES	
10	KEPPRES TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI BPJS KESEHATAN	KEMENKES	
11	PERPRES TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM BPJS	KEMENKES	
12	PERPRES TENTANG GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BPJS.	KEMENKES	
13	PERATURAN BPJS KESEHATAN	ASKES	
14	PEDOMAN/SOP BPJS KESEHATAN	ASKES	

8

TRACK 2: PEMBIAYAAN DAN TARIF PELAYANAN

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PENGHITUNGAN IURAN PBI DAN NON PBI	KEMENKES	
2	PENYUSUNAN STANDAR TARIFF KAPITASI BAGI PPK 1	KEMENKES	
3	PENYUSUNAN STANDAR TARIFF INA-CBGS BAGI RS	KEMENKES	
4	PELATIHAN INA-CBG'S	KEMENKES	

9

TRACK 3: PENGALIHAN PROGRAM DAN KELEMBAGAAN

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PENGALIHAN JAMKESMAS	ASKES	
2	PENGALIHAN JPK JAMSOSTEK	ASKES	
3	PENGALIHAN KEPESERTAAN JK TNI/ KEMHAN	ASKES	
4	PENGALIHAN KEPESERTAAN JK POLRI	ASKES	
5	PENGALIHAN KEPESERTAAN ASKES PNS	ASKES	
6	PENGALIHAN ASKES KE BPJS KESEHATAN	ASKES	

10

TRACK 4: PENYIAPAN PROVIDER

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PENYIAPAN PROVIDERS & PEMENUHAN FASYANKES	KEMENKES	
2	PROYEKSI KEBUTUHAN FASYANKES	KEMENKES	

11

TRACK 5: PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER & RUJUKAN

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	KEMENKES	
	- KONSEP PENGUATAN PELAYANAN PRIMER		
	- PNPK PELAYANAN PRIMER		
2	PENGUATAN SISTEM RUJUKAN & RUJUK BALIK	KEMENKES	
	- FASKES		
	- TENAGA		
	- NSPK		
	- OBAT		

12

TRACK 6: IT/ SIM BPJS KESEHATAN

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PENGGUNAAN NIK	ASKES, KEMENKES	
2	INTEGRASI APLIKASI INA-CBGS KE DLM SIM BPJS KESEHATAN	ASKES, KEMENKES	
3	MERUMUSKAN BUSSINESS/ FUNCTIONAL REGUIREMENT	ASKES, KEMENKES	
4	PENYEMPURNAAN APLIKASI: KEPESERTAAN & PELAYANAN	ASKES, KEMENKES	
5	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR IT	ASKES, KEMENKES	

13

TRACK 7: SOSIALISASI

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PENYUSUNAN BAHAN SOSIALISASI	KEMENKES	
2	SINKRONISASI JADWAL SOSIALISASI	KEMENKES	
3	PELAKSANAAN SOSIALISASI:	KEMENKES	

14

TRACK 8: SDM KESEHATAN

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PEMETAAN KEADAAN & KEBUTUHAN SDM KES MENURUT FASYANKES	KEMENKES	

15

TRACK 9: FARMASI DAN ALKES

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PENYIAPAN NSPK	KEMENKES	
	- FORMULARIUM NASIONAL OBAT		
	- KOMPENDIUM ALKES		
	- E-CATALOG		

16

TRACK 10: RENCANA AKSI

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN	KEMENKES	

17

TRACK 11: MODEL PENYIAPAN JKN

NO	KEGIATAN	LEADING SEKTOR	PROGRESS
1	PENYUSUNAN KONSEP & IMPLEMENTASI MODEL PENYIAPAN JKN DI 3 PROVINSI: DKI JAKARTA, ACEH & JAWA BARAT	KEMENKES	

18

TABEL PROGRES KEGIATAN
POKJA REGULASI BPJS KESEHATAN ...1)

NO	TRACK/ KEGIATAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PROGRESS	MASALAH	TINDAK LANJUT
1.	R.PERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.	SEPTEMBER	Telah disiapkan Surat Permohonan Harmonisasi R.Perpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan kepada Menteri hukum dan HAM	Belum disepakati : Belum disepakatinya besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja penerima upah (sektor swasta),	Akan dilakukan Rapat Harmonisasi R.Perpres oleh Kementerian Hukum dan HAM, sambil menunggu kesepakatan beberapa substansi yang belum disepakati.
2.	PP PENCABUTAN PP NO 69 TAHUN 1991, PP NO 28 TAHUN 2003, DAN PP NO 14 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NO 53 TAHUN 2012	SEPTEMBER	➢Telah disiapkan RPP tentang Pencabutan PP No. 69 Tahun 1991 dan PP No. 28 Tahun 2003 ➢Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sekretariat Negara.	berdasarkan surat Nomor B-887/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2012 tanggal 31 Juli 2013, Hal Permohonan Persetujuan Penyusunan RPP tentang Pencabutan PP No. PP No 69 Tahun 1991, dan PP No 28 Tahun 2003, Presiden memberikan arahan bahwa penyusunan kedua RPP dapat ditindaklanjuti setelah: a. dilakukan perubahan terlebih dahulu atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terkait pembebanan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Veteran dan Perintis Kemerdekaan; dan b. RPP tentang Besaran Iuran Jaminan Kesehatan telah ditetapkan;	Pembahasan akan dilanjutkan setelah Perpres tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan ditetapkan.

19

TABEL PROGRES KEGIATAN
POKJA REGULASI BPJS KESEHATAN ...2)

NO	TRACK/ KEGIATAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PROGRESS	MASALAH	TINDAK LANJUT
3.	PP TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS BPJS KESEHATAN DAN DJS KESEHATAN	OKTOBER	➢Kementerian Keuangan , melalui surat No. S-42/AG.8/2013 Tanggal 22 Juli 2013 , telah mengirimkan RPP tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan kepada Kemenkes. ➢Kemenkes melalui Surat No. HK/Menkes/325/VII/2012 tanggal 9 Juli 2013 telah mengirimkan permohonan persetujuan penyusunan RPP kepada Presiden .	Belum terbitnya persetujuan penyusunan RPP.	Telah dilakukan rapat Panitia Antar Kementerian sebelum Draft dikirimkan Ke Kementerian Hukum dan HAM untuk Harmonisasi.

20

TABEL PROGRES KEGIATAN
POKJA REGULASI BPJS KESEHATAN ...3)

NO	TRACK/ KEGIATAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PROGRESS	MASALAH	TINDAK LANJUT
4.	PP TENTANG TATA CARA HUBUNGAN BPJS DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN	OKTOBER	➢Telah disiapkan permohonan persetujuan penyusunan Peraturan-peraturan ini kepada Presiden RI	➢Pembahasan awal dilakukan dibawah koordinasi DJSN. ➢Saat ini DJSN telah mengirimkan Draft Final kepada Kementerian Kesehatan.	Akan dilakukan rapat Panitia Antar Kementerian untuk melakukan Finalisasi Pembahasan Peraturan-peraturan ini sebelum dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi
5.	PP TENTANG TATACARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI BPJS	OKTOBER			
6.	PERPRES TENTANG GAJI ATAU UPAH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BPJS KESEHATAN	SEPTEMBER			
7.	PERPRES TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BPJS KESEHATAN	OKTOBER			
8.	PERPRES TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN BPJS	OKTOBER			

21

TABEL PROGRES KEGIATAN
POKJA REGULASI BPJS KESEHATAN ⋯4)

NO	TRACK/ KEGIATAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PROGRESS	MASALAH	TINDAK LANJUT
10.	PERMENKES TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	SEPTEMBER	Telah dilakukan pembahasan dengan melibatkan seluruh lintas sektor dan lintas unit terkait.		➢Telah dilakukan pembahasan secara intensif .
11.	PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR TARIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	OKTOBER	Saat ini Pokja Pembiayaan masih melakukan perhitungan Standar Tarif, sehingga pembahasan Permenkes ini belum dapat dilaksanakan.		
13.	PERATURAN BPJS KESEHATAN	NOVEMBER	Penyusunan draft awal oleh PT Askes		
14.	PENYUSUNAN PEDOMAN/SOP BPJS KESEHATAN	NOVEMBER			

22

IURAN PBI DAN KEBUTUHAN ANGGARAN

SASARAN PBI	SUMBER PEMBIAYAAN	BESARAN IURAN PBI	KEBUTUHAN ANGGARAN
Masyarakat miskin dan tidak mampu mengacu data PPLS 2011 sejumlah 86,4 juta jiwa	APBN Kementerian Kesehatan	Rp 19.225/jiwa/bulan	**19,93 T**

23

IURAN NON PBI

SARARAN PESERTA	PROSENTASE UPAH	KONTRIBUSI	Keterangan
PNS/TNI/POLRI/PENSIUNAN	5%	2% OLEH PNS/TNI/POLRI/PENSIUNAN 3% OLEH PEMERINTAH	DARI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
PEKERJA PENERIMA UPAH	5 %	?	USULAN PEMERINTAH 4% PEMBERI KERJA DAN 1% PEKERJA
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH	NILAI NOMINAL	1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,-	1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1

Catatan:
Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp 4.725.000,-) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing-masing kabupaten

24

DATA KONDISI FISIK PUSKESMAS

(Sumber: Rifaskes 2011)

KONDISI	BANGUNAN UTAMA PUSKESMAS	RUMAH DINAS DOKTER	RUMAH DINAS PERAWAT
BAIK	5.715	5.180	6.244
RUSAK RINGAN	2.182	2.635	3.726
RUSAK SEDANG	886	1.432	2.057
RUSAK BERAT	163 *)	899	1.608
TIDAK ADA DATA	239	47 KAB/KOTA	47 KAB/KOTA
JUMLAH	9.185	10.146	13.635

*) Telah dilakukan konfirmasi ada 56 puskesmas rusak berat yang telah direnovasi (53 menjadi baik, 3 menjadi rusak ringan)

25

DANA PERBAIKAN PUSKESMAS, RUMAH DINAS DOKTER & PERAWAT 2012

Kondisi	Bangunan Utama Puskesmas	Rumah Dinas Dokter	Rumah Dinas Perawat
Rusak Ringan	49.734.896.758 (188 Unit)	11.273.100.897 (268 Unit)	10.910.353.889 (355 Unit)
Rusak Sedang	35.322.904.815 (89 Unit)	8.606.467.334 (143 Unit)	8.934.700.975 (207 Unit)
Rusak Berat	9.548.332.667 (18 Unit)	6.817.777.715 (78 Unit)	9.811.787.289 (158 Unit)
Jumlah	150.960.322.340		

26

DANA PERBAIKAN PUSKESMAS, RUMAH DINAS DOKTER & PERAWAT TAHUN 2013

Kondisi	Bangunan Utama Puskesmas	Rumah Dinas Dokter	Rumah Dinas Perawat
Rusak Ringan	O (0 Unit)	0 (0 Unit)	0 (0 Unit)
Rusak Sedang	327.943.843.150 (797 Unit)	0 (0 Unit)	0 (0 Unit)
Rusak Berat	85.468.009.801 (145 Unit)	61.138.022.340 (821 Unit)	0 (0 Unit)
JUMLAH	474.549.875.291		

Dari alokasi anggaran 1T:
- Bangunan : Rp 474.549.875.291
- Alkes dan Pusling : Rp 525.450.124.709

27

RENCANA ANGGARAN PERBAIKAN PUSKESMAS, RUMAH DINAS DOKTER & PERAWAT 2014

Kondisi	Bangunan Utama Puskesmas	Rumah Dinas Dokter	Rumah Dinas Perawat
Rusak Ringan	572.605.578.440 (1.994 Unit)	102.217.086.384 (2.367 Unit)	105.389.051.696 (3.371 Unit)
Rusak Sedang	0 (0 Unit)	83.672.046.102 (1.289 Unit)	86.817.501.705 (1.850 Unit)
Rusak Berat	0 (0 Unit)	0 (0 Unit)	92.653.506.744 (1.450 Unit)
Jumlah	1.043.399.771.071		

28

Usulan Anggaran Bangunan, Alat & Ambulans berdasarkan E-Planning 2012

(dalam ribuan)

Instansi	Total Usulan Alat	Total Usulan Gedung	Total Usulan Ambulance
Puskesmas (Dinas Kab/ kota)	1.922.412.608	2.821.281.150	415.359.783
Rumah Sakit	10.675.044.744	10.708.666.068	
TOTAL	**12.597.457.352**	**13. 529.947.218**	**415.359.783**

Total Usulan Alat + Gedung + Ambulance: Rp. 26.542.764.353.000,-

29

JUMLAH PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis PPK	Kebutuhan	Jml Faskes Telah Bekerjasama dg Askes
1	PPK Tingkat I (Pusk, Klinik Pratama, Dokter Praktek)	80.000*	15.970
2	PPK Tingkat II & III		1.684
		240.000 TT	265.567 TT

*** Satu PPK Tk 1 melayani 3.000 peserta**

30

TAHAPAN PENYIAPAN FASILITAS KESEHATAN

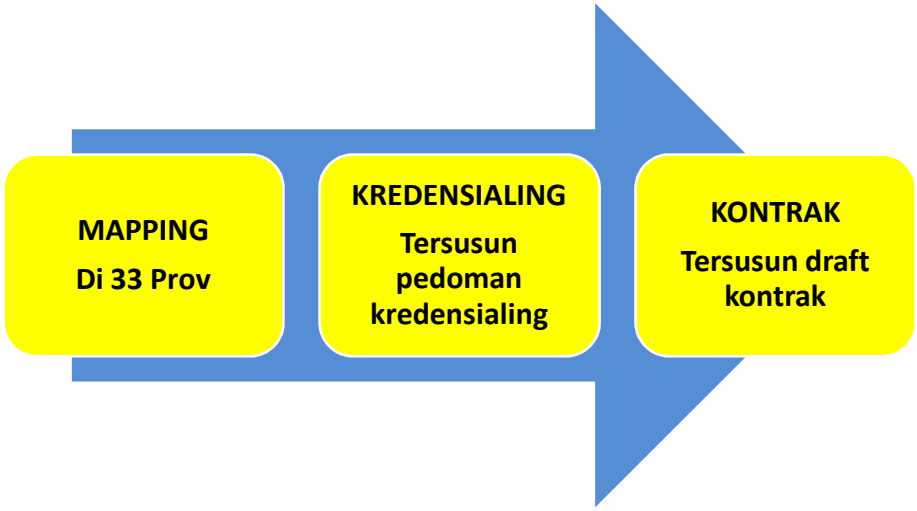

31

STANDAR DAN PEDOMAN FASYANKES

(SELESAI TAHUN 2013)

1. Penyempurnaan Standar Pelayanan Tk. Pertama
2. Penyempurnaan Pedoman Nas. Pelayanan Kedokteran (PNPK)
3. Penyempurnaan Panduan Penatalaksanaan Klinis (SOP) di Pelayanan Primer
4. Penyempurnaan Panduan Pelayanan Kesehatan Tk. Pertama & Sistem Rujukan
5. Penyusunan Pedoman & Pelaksanaan Audit Medis
6. Pemenuhan SPM di seluruh Puskesmas
7. Penetapan Pedoman & Pelaksanaan Akreditasi Fasyankes Tk. Pertama & RS

32

SOS 1: PENYUSUNAN BAHAN SOSIALISASI

No	MATERI	PIC	Progress
1	Kumpulan peraturan	Puskom	cetak I:6.000 buku, cetak II: 5.000 buku
2	Buku saku FAQ BPJS	P2JK	Sudah cetak I 6.000, cetak ke II: 5.000 buku
3	Roadmap JKN	DJSN	Sudah cetak di DJSN
4	Logo & Tagline	Puskom	Selesai
5	ILM JKN	Puskom	Selesai (3 versi TV, 3 versi radio)
6	Filler/ video	Kesra	Tahap finishing di Kesra
7	Buku pegangan sosialisasi	Puskom	Koreksi draft final untuk acc Cetak
8	Buku bahan paparan sosialisasi	Puskom	Perbaikan tampilan slide Koreksi draft final untuk acc Cetak
9	Prototipe media	Promkes	Sedang dalam proses design
10	Pengembangan microsite JKN	Puskom	Dalam penyusunan konten
11	Running text	Puskom	Selesai dan sudah tayang
12	Youtube	Puskom	Terus memperbanyak jumlah tayangan

SOS 2: SINKRONISASI JADWAL SOSIALISASI

NO	MATERI	PROGRESS	TARGET WAKTU
1	Maping kegiatan sosialisasi lintas Unit Utama (waktu, sasaran)	Selesai	Februari
2	Maping kegiatan sosialisasi dg ASKES dan DJSN	Selesai	Februari
3	Updating jadwal dan monitoring	Tiap bulan	
4	Penyusunan jadwal talkshow di TV dan Radio	selesai	April
5	Penyusunan jadwal penayangan ILM	selesai	Juni

SOS 3: PELAKSANAAN SOSIALISASI

NO	MATERI	PROGRESS	TARGET WAKTU
1	Kemkes 21 kegiatan Semester I	Selesai	Juni
2	Kemkes 28 kegiatan Semester 2	Akan mulai	Desember
3	DJSN 5 kegiatan dan Askes 6 kegiatan	In progress	Desember
4	Talkshow TV dan Radio	In progress	November
5	Penayangan ILM	In progress	November

Progress model penyiapan JKN
(uji coba JKN)

35

Ujicoba JKN

- SK Menkes NOMOR 142/MENKES/SK/III/2013 tentang Ujicoba Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan di Provinsi Jawa Barat
- Sudah ada surat Sekjen atas nama Menkes ke 3 provinsi (DKI, Aceh dan Jawa Barat) utk dukungan Gubernur (April 2013)
- Sdh ada draft konsep ujicoba disiapkan konsultan
- Sdg disiapkan draft Pedoman ujicoba

36

TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	Tahapan Kegiatan	Thn 2013							Thn 2014		PJ	Progress
		Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb		
I	Tahap Persiapan											
	1. Penyusunan Dokumen Kebijakan											
	a. SK Menkes ttg Ujicoba										P2JK & HUKOR	Selesai (April)
	b. Pedoman Umum										P2JK & KONS	proses
	c. Petunjuk Teknis										P2JK & KONS	proses
	2. Kesepakatan dengan Provinsi											belum
II	Tahap Pelaksanaan											
	1. Persiapan lapangan											
	a. Penyiapan laboratorium lokasi										TIM & Prov	
	b. Instalasi Software & Hardware JKN										TIM	DKI sdh, Aceh (Ver)
	c. Pelatihan teknis (INA CBG & Verifikasi)										TIM	
	2. Pelaksanaan											
	a. Advoaksi, sosialisasi & perijinan										PT Askes	Proses
	b. Transfer peserta non-PNS										PT Askes	Proses
	c. Pemetaan peserta by sosek & lokasi										PT Askes	Proses
	d. Pemetaan provider sbg calon faskes										PT Askes	Proses
	e. Kredentialing & kontrak faskes										PT Askes	Proses
	f. Distribusi peserta ke PPK I										PT Askes	Proses
	g. Penerapan INA CBG & verifikasinya										PT Askes	Proses
	h. Instrumen JKN lainnya										PT Askes	Proses
III	Tahap Pemantauan & Evaluasi											
	1. Proses iterative										Kons	
	2. Program rutin pemantauan										Tim	
	3. Program evaluasi										Tim & Kons	
	4. integrasi hasil Monev dlm kerangka kerja JKN										Tim & Kons	
	5. Adopsi hasil ujicoba ke dlm riil JKN										BPJS	

Cat. ***TIM = Kemkes (+NCC), Askes, Kons, dll***

PROGRESS DKI JAKARTA

- Materi Ujicoba INA CBG diberlakukan untuk Program KJS
- Sejak 1 April 2013, UPT Jamkesda bekerjasama dng pihak PT.Askes sbg calon BPJS
- Telah ada pedoman pelaksanaan untuk KJS dng SK Gubernur
- Faskes lanjutan yg ikut dalam KJS 95 RS pemerintah & swasta
- Telah dillakukan pelatihan petugas verifikasi bagi SDM PT Askes dan telah dilakukan pelatihan INA CBG dan Administrasi klaim kepada petugas RS
- Implementasi penggunaan tarif INA-CBGs kelas 3 diberlakukan sejak April sedanghkan tarif yang baru dimulai bulan Juli, (menunggu sk gubernur)
- Telah dilakukan evaluasi awal antara Kemkes, Dinkes DKI, UPT Jamkesda, PT Askes (16 Agustus 2013)

PROGRESS ACEH

- Telah dilakukan persiapan seluruh PPK dasar dan lanjutan di provinsi untuk menyelenggarakan JKN
- Telah dilakukan integrasi data kepesertaan jaminan kesehatan
- Pemberlakukan INA CBGs di seluruh JKA Aceh (ranap kelas 3), sedangkan untuk INA-CBGs ranap kelas 1 dan kls 2 bbaru sedang dalam persiapan implementasi
- Telah dilakukan koordinasi dengan Dinkes Prov Aceh
- Telah dilakukan pelatihan Petugas verifikasi INA-CBG
- Persiapan untuk pelatihan INA CBG & Administrasi klaim untuk petugas RS untuk tarif kelas 1 dan kelas 2

39

PROGRESS JAWA BARAT

- Khusus untuk Ujicoba, Spesifik sistem rujukan
- Merupakan kelanjutan ujicoba yg sdh dimulai sejak 2012 di 4 kab/kota (Kab Bandung,Kota Bandung,Kota Cimahi, Kab Sumedang), thn 2013 ditambah Kab Bandung barat
- Draf SK Gubernur ttg ujicoba sistem rujukan propinsi Jabar
- Telah beberapa pertemuan koordinasi persiapan ujicoba sistem rujukan Kemkes, Dinkes Provinsi Jabar, PT.Askes
- Sudah ada panduan/pedoman untuk 10 penyakit:
  - Panduan Standar Minimal Alkes PPK dasar Di Provinsi Jabar
  - Pedoman Standar Obat Berdsrkan Kewenangan PPK
  - Panduan Standar Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Berdasarkan Kewenangan PPK Di Provinsi Jawa Barat
- Akan diuji cobakan standar pelayanan dasar untuk 144 diagnosa

40

Rencana integrasi Jamkesda ke JKN

41

KONDISI CAKUPAN JK SAAT INI

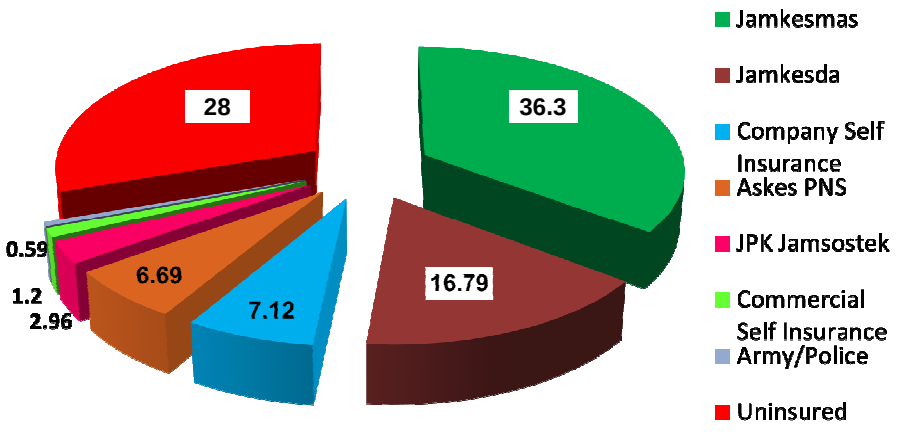

42

JAMKESDA DALAM ERA JKN

1. Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN
2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui pengelola adalah BPJS Kesehatan
3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN → Rp 19.225,- / jiwa/bulan
4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-:
   - menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu yang dibiayai Pemda
   - Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran

43

Penutup

44

PENUTUP

1. Penyelenggaraan JKN pada 1 Januari 2014 harus dipersiapkan sebaik-baiknya
2. Waktu persiapan sangat pendek → perlu bekerja intensif
3. Aspek regulasi menjadi sangat penting agar pelaksanaan JKN berjalan optimal
4. Sosialisasikan JKN seluas-luasnya agar berbagai pihak memahami mekanisme penyelenggaraan JKN

45

TERIMA KASIH

46